

PENGARUH ETIKA DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT DI INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA

Oleh

Dede Nuraisah

4122.4.16.12.0014

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna Memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WINAYAMUKTI
BANDUNG**

2019

PENGARUH ETIKA DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT DI INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA

Oleh

Dede Nuraisah

4122.4.16.12.0014

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna Memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti

Bandung, Agustus 2019
Disetujui dan disahkan Komisi Pembimbing,

DR.(C) Annisa Fitri Anggraeni, SE., MM
Pembimbing

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Dr.H. Deden Komar Priatna, ST., SIP., MM., CHRA.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Nuraisah

NIM : 4122.4.16.12.0014

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul Pengaruh Etika Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Di Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah :

1. Merupakan Skripsi asli dan belum pernah diajukan sebelumnya oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Winaya Mukti maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat-pendapat yang telah d tulis atau d publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang serta dicantumkan daftar pustaka seperti yang terlampir dalam Skripsi ini.

Demikian pernyataan dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum sebagai akibat ketidaksesuaian isi pernyataan ini dengan keadaan sebenarnya.

Bandung, Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,

Dede Nuraisah
Nim: 4122.4.16.12.0014

ABSTRAK

Dede Nuraisah, 2019, Pengaruh Etika dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Di Inspektorat Kota Tasikmalaya, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan DR.(C) Annisa Fitri Anggraeni, SE., MM.

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena seringkali terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tak terkecuali di Kota Tasikmalaya. peran Inspektorat sebagai Aparat pengawas Internal Pemerintah dipertanyakan dalam hal Kualitas Auditnya variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas audit adalah Etika dan Profesionalisme. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat inspektorat kota tasikmalaya yang berjumlah 30 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan hipotesis.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Etika Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya, dengan koefisien regresi sebesar 0,707 dan signifikansi 0,000 ($\text{sig} < 0,05$). Profesionalisme Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya, dengan koefisien regresi sebesar 0,467 dan signifikansi 0,001 ($\text{sig} < 0,05$). Etika dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya. dengan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $30,451 > 3,35$. Nilai $R \text{ Square}$ 0,707 membuktikan bahwa Etika dan Profesionalisme memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit sebesar 69,3% sedangkan sisanya 30,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci : *Etika, Profesionalisme, Kualitas Audit.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Pengaruh Etika dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya”. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah Nabi Besar Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat yang setia taat kepada ajarannya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Salah Satu Syarat Dalam mengikuti Ujian program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan saran serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir.,MS. Selaku Rektor Universitas Winaya Mukti Bandung.
2. Dr.H. Deden Komar Priatna., ST.,SIP., M.M.,CHRA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung.
3. H. Nandang Djunaedi, DB., MM., CHRA. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung.

4. Maria Lusiana Yulianti, SE., MM Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung.
5. DR.(C) Annisa Fitri Anggraeni, SE., MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhinga, serta dengan penuh ketabahan dan kesabaran selalu memberikan motivasi, dukungan dan do'a.
7. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Laporan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penyusunan yang akan datang. Akhir kata, semoga kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal sholeh dan ibadah bagi kita semua dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dari apa yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Auditing	11
2.1.2 Kualitas Audit	25
2.1.3 Etika Auditor.....	28
2.1.4 Profesionalisme Auditor	33
2.2 Kerangka Pemikiran	35
2.2.1 Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya	37
2.2.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya	38
2.2.3 Pengaruh Etika dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya	40
2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	42
2.4 Hipotesis	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan.....	45
3.2 Lokasi Penelitian	46

3.3 Populasi dan Sampel.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel	48
3.5.1 Kualitas Audit.....	49
3.5.2 Etika Auditor	49
3.5.3 Profesionalisme Auditor.....	50
3.6 Instrumen Penelitian	52
3.6.1 Uji Validitas	52
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	53
3.7. Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	57
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.1.2. Dasar Hukum Organisasi	57
4.1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	59
4.1.4. Struktur Organisasi	61
4.1.5. Visi dan Misi.....	71
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1. Karakteristik Responden.....	71
4.2.2. Analisis Deskriptif Pernyataan	75
4.2.3. Hasil Uji Kualitas Data	78
4.2.4. Hasil Analisis Data	81
4.2.5. Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89-90

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Skoring Untuk Jawaban Responden	48
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Pangkat	72
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	73
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	73
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja	74
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
Tabel 4.6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Etika Auditor	75
Tabel 4.7 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Profesionalisme.....	76
Tabel 4.8 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kualitas Audit	77
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas	79
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	80
Tabel 4.11 Hasil Regresi Linier Berganda.....	81
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	82
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	83
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Krangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terwujudnya *good governance* di Indonesia pada saat ini semakin meningkat dan perlu diterapkan dengan cara melakukan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Mindarti dkk (2016) akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi dan efektivitas dari program pemerintah tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat (Syafitri, 2016). Pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga dapat menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pembangunan yang berada di bawah Walikota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap urusan Pemerintah baik wajib atau pilihan. Dalam hal ini aparat Inspektorat memiliki peran yang cukup signifikan sebagai Pengawas Internal dalam mendeteksi kecurangan dan meningkatkan Laporan Keuangan Daerah.

Untuk itu aparat Inspektorat dituntut kinerjanya agar dapat meningkatkan kualitas auditnya. Pada dasarnya kualitas audit menurut Watkins et al (2004) adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntansi Pemerintah (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Profitabilitas pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan profitabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit (De Angelo, 1981; dalam Rosnidah dkk 2011). Sedangkan kualitas audit menurut Ida Rosnidah (2010:9) adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehubungan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti yang baru saja terjadi pada Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya (18/11/2018, <http://infokorupsi.com>), terdapat kasus penyuapan yang juga melibatkan oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, salah satu dari sekian jumlah

diantaranya oknum aparat Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat di pungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu dan kesempatan. Semoga hal-hal yang seperti ini menjadi satu catatan penting dan contoh buruk yang ada ini bisa menjadi batasan indikator sehingga tidak lagi terjerumus ke dalam hal serupa.

Mengapa hal ini dapat terjadi ? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu terjadinya ketidak efisienan dan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Di samping itu akibat lemahnya pengendalian internal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Di sisi lain masih menjadi tanda tanya besar dikalangan profesi audit Internal mengenai sejauh mana peran serta fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau Inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Audit pemerintah merupakan suatu elemen penting dalam penegakan *good governance*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) dalam Effendy (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dipakai organisasi publik karena output yang dihasilkan tidak mudah diukur. Dengan kata lain ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Untuk mencapai pemerintah yang baik (*good governance*) maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat karena *good government* yang efektif menuntut adanya kesinergian yang baik, integritas, profesionalisme dan etos kerja serta moral yang tinggi dari semua elemen. Dengan demikian *good government* dalam penyelenggaraan pemerintah bukan hanya merupakan tuntutan dan harapan masyarakat tetapi juga merupakan tantangan tersendiri. Tuntutan untuk menciptakan *good governance* yang bebas tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang antara eksekutif, judikatif dan legislatif.

Untuk mencapai *good governance*, seorang auditor aparat Inspektorat harus dapat meningkatkan kualitas auditnya. Peran Inspektorat adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar.

Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan daerah otonomi baru yang berdiri sejak tahun 2001 juga terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan Pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, diantaranya dengan Raihan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 untuk pertamakalinya. Inspektorat Kota Tasikmalaya selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah tentu memiliki peran penting dalam pencapaian tersebut.

Kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota. Ayat (3) menyebutkan bahwa Seksi Pengawasan adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah. Ayat (4) menyebutkan bahwa kelompok jabatan fungsional adalah pelaksanaan pemeriksaan atau audit keuangan. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Pasal 4 menyebutkan bahwa Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat dalam menghasilkan audit yang berkualitas dipengaruhi beberapa faktor, yaitu etika dan profesionalisme dari auditor aparat Inspektorat. Etika Auditor merupakan salah satu faktor pendorong aparat Inspektorat bekerja lebih maksimal, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethikos*” yang berarti timbul dari kebiasaan, etika tidak dapat diartikan secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, dan transparansi. Etika secara umum didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai normal yang memiliki rangkaian nilai (Arens *dkk*, 2008:98). Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Dewi, 2009).

Selain Etika, di dalam standar umum bagian pertama SA seksi 210 menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (SPAP, 2011). Sedangkan, dalam standar umum bagian ketiga SA seksi 230 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan menyusun laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP, 2011). Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah : “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”.

Profesionalisme merupakan suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Kurniawan,2005:72). Sedangkan profesionalisme auditor internal merupakan suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari memenuhi undang undang dan peraturan yang berlaku (Arens, 2011). Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap audit internal.

Kualitas audit dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan, karena dengan semakin tingginya kualitas audit maka dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan di dalam dan di luar perusahaan untuk mengambil keputusan. Selain itu semakin tingginya kualitas audit juga dapat memperkecil kekhawatiran adanya skandal keuangan yang dapat mengurangi rasa

kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah, maka peneliti bermaksud meneliti hal tersebut mengenai etika dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dengan judul penelitian sebagai berikut:

**“Pengaruh Etika dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit di
Inspektorat Kota Tasikmalaya”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Etika Auditor Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya
2. Profesionalisme Auditor Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya
3. Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya
4. Etika dan Profesionalisme Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya ?

3. Bagaimana Pengaruh Etika dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya. Responden adalah auditor internal pemerintah yang sampelnya merupakan auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Tasikmalaya.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh etika terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat di Kota Tasikmalaya .
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat di Kota Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika dan Profesionalisme terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat di Kota Tasikmlaya.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Secara praktis

Bagi pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam pengawasan daerah, sehingga dapat

dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya. Bagi Auditor Intern Lembaga (Inspektorat), sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

b. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal Etika dan Profesionalisme Auditor Internal Pemerintah, serta diharapkan menjadi tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan audit.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor. Pengertian auditing semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan auditing.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:3), pengertian auditing adalah :

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Mulyadi (2014: 9) menyatakan bahwa pengertian audit adalah :

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Arens *et al* (2011: 4) pengertian audit adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Artinya audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh yang kompeten, orang independen.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan untuk melaporkan dan menetapkan drajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.1.1 Pengertian Audit Sektor Publik

Menurut Suhayati dan Rahayu (2010) pengertian audit sektor publik adalah :

“Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah.”

Menurut Rai (2008) pengertian audit sektor publik adalah :

“Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang dikemukakan dengan kriteria yang ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan penyediaan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2011) jenis-jenis audit sektor publik antara lain adalah :

1. Audit Keuangan

Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi.

4. Audit Forensik

Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Sebagai suatu ilmu yang baru, belum terdapat definisi baku dari akuntansi forensik.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu :

1. Audit Keuangan

Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi yang komperhensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit Kinerja

Audit yang dilakukan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, eektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Audit kinerja adalah pemeriksaan pemeriksaan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja suatu entitas atau program kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit Kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan Negara dalam mencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip ekonomi, efesiensi, dan efektivitas, tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan manajemen.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit Khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit.

Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan audit

investigasi, maka dari itu audit dengan tujuan tertentu dapat disebut juga udit Investigasi.

2.1.1.3 Peran dan Standar Profesional Akuntan Publik

Menurut Mulyadi (2008:12) peran profesi akuntan publik yaitu bertanggung jawab untuk menaikan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Menurut Mulyadi (2008) ada lima macam standar profesional yang diterbitkan oleh dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu :

1. Standar Auditing

Standandar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri darin sepuluh standar dan rinci dalam bentuk pernyataan standar audit (PSA) yaitu :

a. Standar umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perilaku, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor

- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesuionalnya dengan cermat dan seksama

b. Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistensi harus disuervisi dengan semestinya
- 2) Pemahaman memadai atas intern harus diperoleh untuk merencanakan audit menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup bagus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit

c. Standar Pelaporan

- 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan jika ada ketidak konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya

- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

2. Standar Atestasi

Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam nonaudit.

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review

Standar Jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.

4. Standar Jasa Konsultasi

Standar jasa konsultan memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa bagi masyarakat.

5. Standar Pengendalian Mutu

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntan Publik dan

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Yang Diterbitkan Oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntansi Indonesia.

2.1.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggung jawaban keuangan daerah”

Menurut Maemsah dalam Halim (2009), keuangan daerah dapat diartikan :

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Dalam Rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-Prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2018

pasal 6 berbunyi bahwa dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 pasal 129 menyebutkan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

2.1.1.5 Pengawas Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah yang bersifat wajib
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah yang bersifat pilihan; dan
3. Pelaksanaan urusan pemerintah menurut tugas pembantu.

Pengawasan terhadap urusan Pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jendral Departemen, unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Walikota Tasikmalaya No.52 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat terdiri dari :

- (1) Inspektur pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya.
- (2) Rincian tugas Inspektur Pembantu :
 - a. Melaksanakan penyusunan usulan rencana program kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
 - c. Menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan kerja di wilayah kerjanya;

- g. Melaksanakan tugas sebagai manajer pengawasan di wilayah kerjanya dengan uraian tugas yang diatur lebih lanjut oleh inspektur; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai wilayah kerja :

- a. Sekertariat DPRD
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Sekertariat Korpri;
- f. Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang Berada di dalam Wilayahnya;
- g. Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- h. Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- i. Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- j. Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- k. Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

- l. Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- m. Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- n. Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- o. Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

(4) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai wilayah kerja :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Dinas bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
- c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
- j. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(5) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai wilayah kerja :

- a. Sekertariat Daerah;
- b. RSUD Dr. Soekarjo;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;

- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Dinas Pendapatan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- k. PD. Pasar Resik.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui :

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan;
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan intern melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tujuan standar audit APIP adalah untuk :

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;
2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
5. Menilai, Mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit;
7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

2.1.2 Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981) yang dikutip oleh Rosnidah dkk (2011) pengertian kualitas audit adalah :

“Kualitas audit sebagai kemungkinan (join probality) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam aistem akuntansi kliennya.”

Menurut Siman jentak (2008), pengertian kualitas audit adalah :

“Pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.”

Berdasarkan pengertian pengertian di atas, kualitas audit merupakan karakteristik audit yang memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu, yang menggambarkan praktik-praktik audit terbaik serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya.

Menurut PP No 70 tahun 2005 dalam pasal 27 disebutkan bahwa tugas Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa,
dan
3. Pelaksanaan urusan pemerintah desa.

2.1.2.1 Pengukuran Kualitas Audit

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam lampiran 3 SPKN paragraf 17 disebutkan bahwa :

“Besarnya Manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau direkomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.”

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit sehingga pelaporan dan memberikan rekomendasi. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menurut Efendy (2010) kualitas audit diukur melalui :

1. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme)

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau

rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme.

2. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit)

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa

3. Kualitas tindak lanjut audit
4. Pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

2.1.3 Etika Auditor

Menurut Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark s Beasley (2008: 98)

yaitu :

“Serangkaian Prinsip atau nilai moral”

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian etika adalah :

“Kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.”

Sehingga etika dapat diartikan :

- Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
- Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional.

Menurut Josephson Institute yang dikutip oleh Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark s Beasley (2008:99) terdapat enam nilai inti etis mengenai perilaku etis, yaitu :

1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*)

Mencakup kejujuran, integritas, realibitas, dan loyalitas

2. Penghargaan (*respecct*)

Mencakup gagasan seperti kepantasan (*civility*), kesopansantunan (*courtesy*), kehormatan, toleransi dan penerimaan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri, juga berusaha sebaik mungkin dan memberi teladan dengan contoh.

4. Kelayakan (*fairness*)

Dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan dan keseksamaan.

5. Perhatian (*caring*)

Berarti sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan baik.

6. Kewarganegaraan (*citizenship*)

Termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan baik.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2015: 15) Seorang akuntan profesional wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar berikut ini :

- 1) Integritas – lurus/tidak”berbelok ke kanan dan ke kiri”, lugas, dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- 2) Objektif – tidak membiarkan bias, berbenturan kepentingan atau tekanan pihak lain menghilangkan kearifan dan akal sehat profesional dan bisnis.
- 3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional – memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memastikan bahwa klien atau karyawan mendapatkan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terakhir dalam praktik,

ketentuan perundangan dan teknik, dan bertindak sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.

- 4) **Konfidensialitas** – menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional bisnis dan, karenanya, tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa hak/wewenang yang tepat dan spesifik; kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Juga tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, untuk keuntungan pribadi akuntan atau pihak lain.
- 5) **Prilaku Profesional** – memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi.

Code of ethics menggunakan pendekatan kerangka konseptual (*conceptual framsework approach*). Pendekatan ini menjelaskan secara umum ancaman terhadap kode etik profesional, bagaimana mengidentifikasinya, dan apa penangkal terhadap ancaman yang diidentifikasi (Tunakotta; 2015 : 51)

2.1.3.1 Pengukuran Etika Auditor

Setiap Praktisi wajib memenuhi prinsip dasar etika profesi dibawah ini (SPAP seksi 100,2011) :

- (a) Prinsip integritas

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

(b) Prinsip objektivitas

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, berbenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak (*under influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

(c) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

(d) Prinsip Kerahasiaan

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh ,mengungkapkan

informasi tersebut kepada pihak ketiga karena persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadadinya atau pihak ketiga.

(e) Prinsip prilaku Profesional

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

2.1.4 Profesionalisme Auditor

Profesionalisme pada audit internal merupakan suatu kredibilitas dan kunci sukses dalam menjalankan fungsi dalam suatu perusahaan. Menurut Arens (2010) pengertian profesionalisme adalah :

“Suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Andrias Harefa (2014:134) pengertian profesionalisme adalah :

“Soal sikap yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja.”

Menurut Sawyer yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar (2008) pengertian Profesionalisme auditor internal adalah

“Profesionalisme audit internal hendaknya memiliki kecakapan dalam melaksanakan setiap penugasan audit, atau paling tidak memiliki akses atas kecakapan, memiliki kecakapan dalam keahlian utama yang diperlukan dalam melakukan audit internal yang mendalam, mampu memahami orang lain dan memiliki apresiasi”

Berdasarkan pengertian-pengertian, profesionalisme auditor internal adalah sikap, kemampuan, maupun kredibilitas yang dimiliki auditor internal dalam melaksanakan setiap penugasan audit sebagai tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2.1.4.1 Pengukuran Profesionalisme Auditor

Menurut Hall (1968) dalam Nugrahini (2015) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Inspektorat merupakan aparat pemeriksaan intern pemerintah yang berada di bawah Walikota yang bertugas melakukan pengawasan

terhadap urusan pemerintah baik wajib atau pilihan. Untuk itu aparat Inspektorat dituntut kinerjanya agar dapat meningkatkan kualitas auditnya. Pada dasarnya kualitas audit menurut adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo, 1981; dalam Rosnidah dkk, 2011).

Untuk mencapai *good governance*, seorang auditor aparat Inspektorat harus dapat meningkatkan kualitas auditnya. Peran Inspektorat adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar, diluar tugas-tugas awal Inspektorat sebelumnya sebagai aparat pengawas. Selain itu peranan dari Inspektorat adalah untuk membantu kepala daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Bastian, 2007).

Kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten/kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan pertanggungjawab kepada bupati/walikota. Pasal 4 menyebutkan bahwa Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menurut Efendy (2010) kualitas audit diukur melalui kualitas proses (keakuratan temuan audit, sikap *skeptisme*), kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit), kualitas tindak lanjut hasil audit.

2.2.1 Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, akuntan publik harus menyadari adanya tanggung jawab kepada publik, kepada klien, dan kepada sesama praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi (Arens dkk, 2008). Etika profesi auditor digunakan dalam interpretasi dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan menghasilkan kualitas audit yang layak untuk dipublikasikan (Arens, 2012:120).

Jones (1991) dalam Sukrisno Agoes dan Jan Hoesda (2012) menyimpulkan secara empiris bahwa intensitas moral berbeda-beda

sesuai moral itu sendiri, dan masalah moral terkait pada berbagai jenis perilaku pengurangan kualitas audit. Didukung dari penelitian sebelumnya bahwa etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, etika profesi berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Apabila terjadi perubahan sedikit saja pada etika profesi maka akan terjadi perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Sehingga semakin tinggi etika profesi maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (M.Budi Djatmiko, M.Zulfa, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang terbentuk adalah :

H₁: Etika berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat

2.2.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

Profesionalisme auditor Internal merupakan sikap, kemampuan, maupun kredibilitas dalam menjalankan profesi sebagai auditor internal (Rahadiani, 2012). Menurut standar umum bagian pertama SA seksi 210 (SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, dalam standar umum bagian ketiga SA seksi 230 (SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan

laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum SPKN adalah : “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan auditor yang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi (Rosnidah dkk, 2011). Dalam hal ini seorang auditor dituntut agar bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Dengan demikian Profesionalisme perlu ditingkatkan, karena sangat penting dalam melakukan pemeriksaan sehingga akan memberikan pengaruh pada kualitas audit auditor (Futri dan Juliarsa, 2014). Jadi semakin tinggi profesionalisme yang

dimiliki oleh Aparat Inspektorat, maka akan semakin tinggi pula kualitas audit aparat Inspektorat. Berdasarkan Uraian tersebut, maka hipotesis yang terbentuk adalah :

H₂: Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat

2.2.3 Pengaruh Etika dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

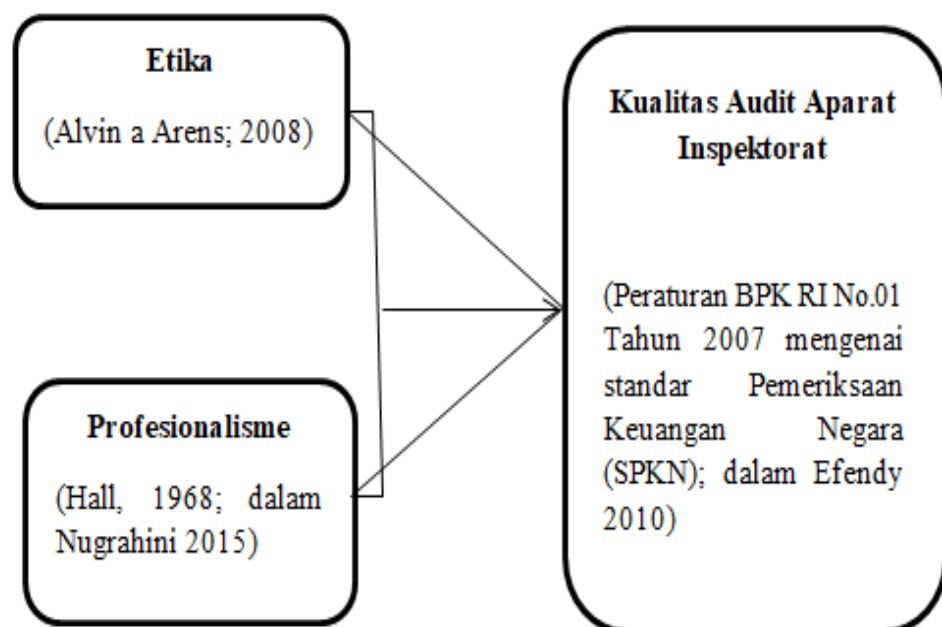
Kualitas audit menunjukkan peluang seorang auditor untuk menemukan temuan penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Kualitas audit dapat diukur dengan tiga faktor atau atribut diantara lainyaitu : kualitas proses (keakuratan temuan audit,sikap skeptisme), kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit), dan kualitas tindak lanjut hasil audit (Muh. Taufiq Efendy, 2010). Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika juga berarti : kumpulan asas atau nilai moral – yang dimaksud disini adalah kode etik. Ketiga, etika merupakan keyakinan-keyakinan etis (asas atau nilai yang dianggap baik atau buruk) telah menjadi bahan refleksi kritis bagi suatu penelitian dan metodis (Bartens, 2013 :5). Etika seseorang auditor dapat tercemin dari karakteristik individu,faktor lingkungan pekerjaan dan faktor dalam pekerjaan.

Profesionalisme merupakan suatu tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya,

dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat (Arens,2010 :87). Sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini karena auditor yang berkualitas. Hal ini karena auditor yang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan sesama profesi.

H₃: Etika dan Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit aparat inspektorat

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud menggambarkan dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema kerangka Pemikiran

2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ida Rosnidah, Rawi, dan Kamarudin (2011)	Analisis Dampak motivasi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Cirebon)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak motivasi dan profesionalisme secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit. hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme yang tinggi dan ditunjang dengan motivasi yang tinggi dari aparat	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu Profesionalisme . Sedangkan variabel dependen yaitu Kualitas audit Aparat Inspektorat.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan Variabel Indevenen yaitu Motivasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Etika.
2.	Syusilawati dan Maya R Atmawinata (2014)	Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit : Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Hasil Penelitian menunjukan bahwa Profesionalisme dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu profesionalisme dan variabel dependen kualitas audit.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan Variabel Independen yaitu Independensi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel lain yaitu Etika.

3.	Margaretha Puspitaningrum (2010)	Hubungan Antara Penerapan Etika dengan Peningkatan Profesionalisme Auditor	Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Profesionalisme Auditor	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen Etika dan Variabel dependen profesionalisme Auditor.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan Variabel dependen yaitu kualitas audit sedangkan dalam penelitian ini menggunakan lain yaitu peningkatan Profesionalisme.
4.	Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014)	Pengaruh Independensi, profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali	Hasil penelitian menunjukan bahwa independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu Etika dan variabel dependen kualitas audit.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lain yaitu independensi, tingkat pendidikan, pengalaman dan kepuasan kerja auditor sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel lain yaitu variabel independen lain yaitu profesionalisme.

2.4 Hipotesis

Hipotesis berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa :

H₁: Etika berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

H₂: Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

H₃: Etika dan Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Tasikmalaya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang digunakan

Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian mengenai “Pengaruh Etika dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Pengawasan Daerah Inspektorat Kota Tasikmalaya” adalah tipe penelitian penjelasan (*explanatory/confirmatory research*), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor pada Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagai responden dalam penelitian ini.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan Etika auditor, bagian kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan profesionalisme auditor, dan bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas audit inspektorat, bagian keempat berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit, bagian kelima berisikan

sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

Kuisisioner yang dikirimkan disertai dengan surat permohonan serta penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Petunjuk pengisian kuisisioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Djuanda No. 191 Komplek bale Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Jangka waktu penelitian ini dari bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor/pemeriksa Inspektorat Kota Tasikmalaya yang berjumlah 30 (Tiga Puluh) orang berdasarkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya.

Jenis penelitian ini adalah sensus, menurut Erlina dan Mulyani (2007) jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus. sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen. Metode yang digunakan adalah metode survey, menurut Ghazali dan Ikhsan (2006) yaitu merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (1999), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini yang akan diberikan kuesioner adalah seluruh Auditor/Pemeriksa Inspektorat Kota Tasikmalaya yang berjumlah 30 (Tiga puluh) orang.

Tahapan dalam penyebaran dan pengumpulan kuesioner dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh Auditor/pemeriksa Inspektorat Kota, kemudian menunggu pengisian tersebut. Tahap kedua adalah pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh Auditor Inspektorat Kota Tasikmalaya untuk dilakukan pengolahan data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dikirim, sedangkan sumber data berasal dari jawaban para Auditor/pemeriksa Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dirancang sendiri oleh peneliti, kuesioner ini mengacu pada variabel dan indikator penelitian yang peneliti ambil berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) dan Peraturan Menteri dalam Negri No.28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket dengan menggunakan skala sikap model *likert* yang dimodifikasi dari *likert* 1-5. *Liker scale* (skala likert) merupakan skala interval yang secara spesifik menggunakan lima pilihan yaitu rincian 1 (Sangat Tidak Setuju/STS), 2 (Tidak Setuju/TS), 3 (Ragu-Ragu/Netral), 4 (Setuju/S) dan 5 (Sangat Setuju/SS).

Tabel 3.1
Skoring Untuk Jawaban Responden

No	Sikap Responden	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Ragu-Ragu/Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas audit Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel independennya terdiri dari Etika auditor (X_1), Profesionalisme auditor (X_2), dan Etika dan Profesionalisme auditor (X_3). Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah :

3.5.1. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit diukur dengan menggunakan delapan item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap bagaimana kualitas proses audit, kualitas hasil audit. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit ini diadopsi dari penelitian Nugraha (2012) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih diantara lima jawaban dari sangat setuju sampai kejawaban.

3.5.2. Etika Auditor

Etika dalam pengauditan adalah suatu sikap dan perilaku mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Etika auditor diukur dengan menggunakan pertanyaan yang menggambarkan tingkat presepsi etika auditor terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku. Responden diminta menjawab tentang bagaimana presepsi mereka, memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item

pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala *Likert* 5 poin, dimana 1 poin diberikan untuk jawaban yang berarti etika paling rendah dan seterusnya 5 poin diberikan untuk jawaban yang berarti etika paling tinggi.

3.5.3. Profesionalisme Auditor

Profesionalisme adalah dedikasi terhadap profesi, kewajiban, sosial, sikap perilaku, menjunjung tinggi kode etik dalam profesi dan hubungan dengan sesama profesi maupun disiplin ilmu. Profesionalisme auditor diukur dengan menggunakan enam item pertanyaan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap seberapa besar profesionalisme yang dimilikinya untuk menjalankan proses audit dengan baik, yaitu tingkat aspirasi yang ingin diwujudkan melalui audit yang berkualitas, ketangguhan, keuletan dan konsistensi. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing menggunakan *Likert* 5 poin dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti profesionalisme paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti profesionalisme paling tinggi.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Dependen			
Kualitas Audit (Y)	Kualitas audit merupakan standar auditing dan standar pengendalian mutu, yang menggambarkan praktik-praktik audit terbaik serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya.	• Keseuaian pemeriksaan dengan standar audit • Kualitas hasil laporan audit • Kualitas tindak lanjut audit	Auditor
Independen			
Etika Auditor (X1)	Etika adalah Kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.”	• Prinsip Integritas • Prinsip Objektivitas • Kompetensi serta Sikap kecermatan • Prinsip Kerahasiaan • Prilaku profesional	Auditor
Profesionalisme Auditor (X2)	Profesionalisme auditor adalah sikap, kemampuan, maupun kredibilitas yang dimiliki auditor internal dalam melaksanakan setiap penugasan audit sebagai tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.	• Pengabdian pada profesi • Kewajiban Sosial • Mampu membuat keputusan sendiri • Keyakinan terhadap peraturan profesi • Hubungan dengan sesama profesi	Auditor

3.6. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten saat diajukan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda. Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas, dan uji reliabilitas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pernyataan kuesioner. Data tersebut antara lain: umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas

dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid.
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $< r$ tabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah *One Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 .

3.7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.

a. Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan Regresi Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kualitas Audit Inspektorat

β_0 = intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X_1 = Etika

X_2 = profesionalisme

X_3 = etika dan profesionalisme

e = *error term*

1) Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2

bernilai kecil berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013:97)

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat:

a. Membandingkan F hitung dengan F tabel

- (1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- (2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Melihat *Probabilities Values*

- (1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
- (2) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima

3) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel

- (1) Jika t hitung $> t$ tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
- (2) Jika t hitung $< t$ tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

b. Melihat *Probabilities Values*

- (1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.
- (2) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya, Inspektorat kota Tasikmalaya yang baru dibentuk Tahun 2008 sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Inspektorat selaku penanggung jawab utama, penyelenggaraan pembangunan dibidang pengawasan, perlu menyusun Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok lima tahun kedepan.

4.1.2. Dasar Hukum Organisasi

Sebagai Institusi Formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Tasikmalaya mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 181);
16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 308).

4.1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota

Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

4.1.3.1. Kedudukan

Inspektorat Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tasikmalaya dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

4.1.3.2. Tugas Pokok

Inspektorat Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.3.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengawasan;

Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

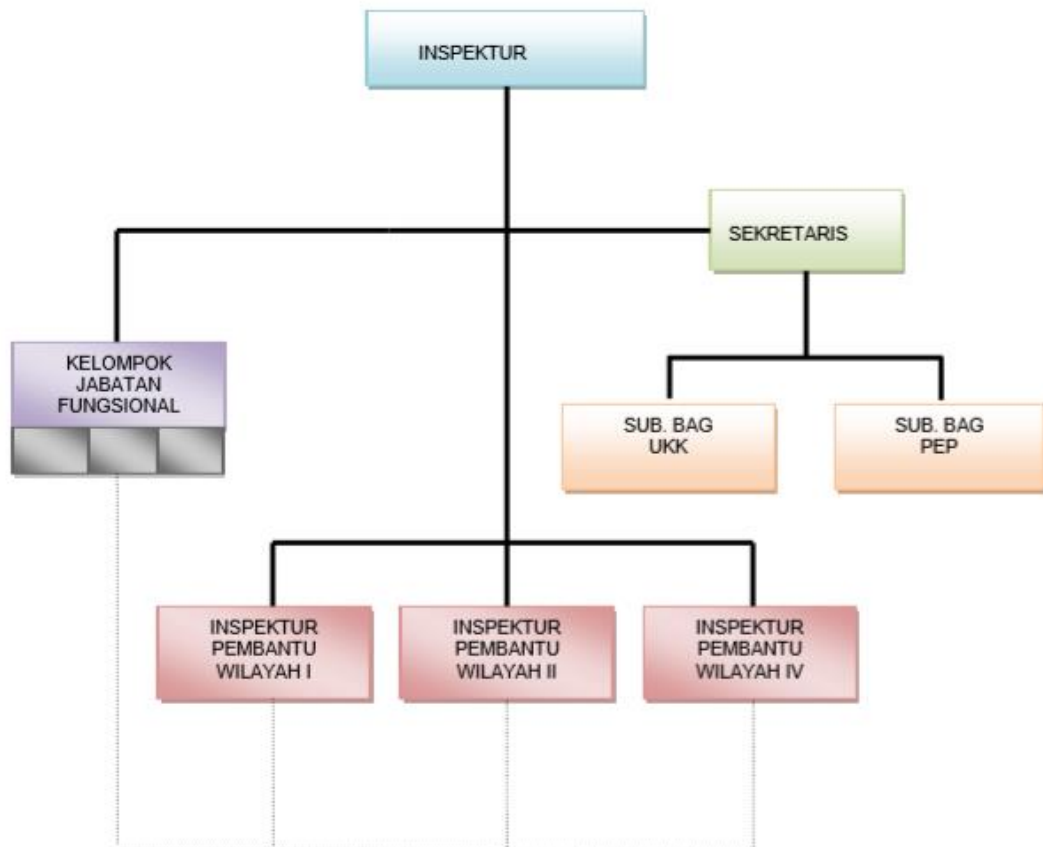
4.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 - 2) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 - 3) Auditor Kepegawaian

Bagan struktur organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya

4.1.4.1. Uraian pekerjaan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya :

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan program kerja inspektorat. Rincian Tugas

Inspektur :

1. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja inspektorat;
2. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja inspektorat untuk mendukung visi dan misi daerah;
3. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota dalam bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dalam tugas pengawasan;
5. menyelenggarakan pengoodinasian pelaksanaan kegiatan inspektorat;
6. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi inspektorat;
7. menyelenggarakan manajemen dan pengelolaan kegiatan pengawasan fungsional;
8. menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat
9. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas inspektorat;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat. Rincian tugas Sekretariat:

1. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Inspektorat;
3. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan inspektorat;
4. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan inspektorat;
5. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas;
6. menyelenggarakan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
7. menyelenggarakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
8. menyelenggarakan penyusunan, inventarisasi, koordinasi dalam rangka penatausahaan proses pengaduan;

9. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja inspektorat;
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

- a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengelolaan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:

1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan inspektorat;
3. melaksanakan pengelolaan perpustakaan inspektorat
4. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan inspektorat;

5. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan inspektorat;
6. mengelola kepegawaian di lingkungan inspektorat;
7. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan inspektorat;
8. melaksanakan penatausahaan keuangan;
9. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Inspektorat;
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektorat.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan:

1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja inspektorat;

3. melaksanakan koordinasi dengan kelompok jabatan fungsional dalam menyiapkan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
4. menyiapkan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;
5. menyiapkan bahan/data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. mengadministrasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
7. mengadministrasikan proses penanganan pengaduan;
8. menyusun dan mengelola data serta dokumentasi pengawasan;
9. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola pengaduan masyarakat dalam wilayahnya;

Rincian tugas Inspektur Pembantu :

1. melaksanakan penyusunan usulan rencana program kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
2. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;

3. menyelenggarakan pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
4. melaksanakan pelaksanaan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
5. membantu Inspektur dalam menyelenggarakan manajemen dan pengelolaan kegiatan pengawasan fungsional;
6. melaksanakan proses penanganan pengaduan masyarakat;
7. melaksanakan evaluasi dan penilaian tugas pengawasan;
8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional Auditor;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai wilayah kerja :

- a) Sekretariat DPRD
- b) Dinas Pendidikan;
- c) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d) Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- e) Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

- f) Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- g) Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- h) Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- i) Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- j) Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- k) Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- l) Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- m) Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya; dan
- n) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai wilayah kerja :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- m. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai wilayah kerja :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. RSUD Dr. Soekardjo;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku

4.1.5. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kegiatan pelayanannya tentunya tidak lepas dari sebuah visi dan misi yang berbentuk gagasan atau pedoman tertulis. Inspektorat Kota Tasikmalaya memiliki visi dan misi yang menjadi harapan atau tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Mandiri Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintah yang Bersih (Clean Government).

Misi

1. Meningkatnya kompetisi dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Karakteristik Responden

Terdapat 5 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu Pangkat, usia, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan jenis kelamin.

4.2.1.1. Pangkat

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah	Persentase
1	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	3,3%
2	Auditor Muda	12	40%
3	Auditor Pertama	5	16,6%
4	Auditor Penyelia	2	6,6%
5	Auditor Kepegawaian Muda	1	3,3%
	Pengawas Pemerintahan Madya	2	6,6%
	Pengawas Pemerintahan Muda	3	10%
	Pengawas Pemerintahan Pertama	3	10%
Total		30	100%

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa Auditor dengan pangkat sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan adalah 1 orang (3,3%), pangkat sebagai Auditor Muda sebanyak 12 orang (40%), pangkat sebagai Auditor Pertama sebanyak 5 orang (16,6%), pangkat sebagai Auditor Penyelia sebanyak 2 orang (6,6%), pangkat sebagai Auditor Kepegawaian Muda sebanyak 1 orang (3,3%), pangkat sebagai Pengawas Pemerintahan Madya sebanyak 2 orang (6,6%), pangkat sebagai Pengawas Pemerintahan Muda sebanyak 3 orang (10%), dan pangkat sebagai Pengawas Pemerintahan Pratama sebanyak 3 orang (10%), Artinya responden terbanyak adalah Auditor yang berpangkat sebagai Auditor Muda, sebanyak 12 orang.

4.2.1.2. Umur

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<25 Tahun	1	3,3 %
2	26 – 35 Tahun	15	50 %
3	36 – 55 Tahun	14	46,6%
		30	100 %

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan data tabel 4.2 diatas diperoleh bahwa karyawan yang berusia <25 Tahun sebanyak 1 orang (3,3%), usia 26 - 35 tahun sebanyak 15 orang (50%), usia 36 – 55 tahun sebanyak 14 orang (46,6%). Artinya Responden terbanyak adalah auditor yang berusia 26 – 35 Tahun.

4.2.1.3. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	5	16,6 %
2	S1	24	80%
3	D3	1	3,3%
	Total	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2019

Dari tabel 4.3 diatas diperoleh bahwa Auditor dengan pendidikan S2 sebanyak 5 orang (16,6%), S1 sebanyak 24 orang (80%),D3 sebanyak 1 orang (3,3%). Artinya responden terbanyak adalah Auditor dengan pendidikan S1.

4.2.1.4. Pengalaman Kerja

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	1 - 5 Tahun	6	20 %
2	6 - 10 Tahun	14	46,6%
3	> 10 Tahun	10	33,3%
Total		30	100 %

Sumber Data Primer, 2019

Dari tabel 4.4 diatas diperoleh bahwa auditor dengan masa kerja 1 - 5 tahun sebanyak 6 orang (20%), masa kerja 6 - 10 tahun sebanyak 14 orang (46,6%), dan masa kerja >10 tahun sebanyak 10 orang (33,3 %). Artinya responden terbanyak adalah karyawan dengan masa kerja 6 sampai 10 tahun. Auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Tasikmalaya mempunyai pengalaman kerja banyak, hal ini dapat diasumsikan bahwa auditor yang berpengalaman akan memberikan kualitas audit yang lebih baik. Seorang auditor berpengalaman akan mampu mengasah kepekaannya dalam memahami informasi, kecurangan dan kesalahan penyajian laporan keuangan (Ariyantini dkk, 2014). Auditor yang berpengalaman semakin banyak tugas yang dia kerjakan, maka dari itu dia akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi sesuatu hal yang memerlukan perlakuan khusus.

4.2.1.5. Jenis Kelamin

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	22	76,6 %
2	Perempuan	8	23,3 %
Total		30	100 %

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (73,3%), dan karyawan perempuan sebanyak 8 orang (26,6%). Artinya responden terbanyak adalah laki-laki.

4.2.2. Analisis Deskriptif Pernyataan

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi etika, profesionalisme dan kualitas audit.

- a. Analisis Deskriptif Variabel Etika Audit terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan analisis dari hasil jawaban responden mengenai Etika audit. Nilai rata-rata hasil jawaban responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Etika Audit

Item Pernyataan	Frekuensi dan presentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
X _{1.1}				9	21	141	4,70
				30%	70%		
X _{1.2}			2	7	21	139	4,63
			6,6%	23,3%	70%		
X _{1.3}				21	9	129	4,70
				70%	30%		
X _{1.4}				10	20	140	4,67
				33,3%	66,6%		
X _{1.5}				7	23	143	4,77
				23,3%	76,6%		
X _{1.6}				9	21	141	4,70
				30%	70%		
X _{1.7}				10	20	130	4,33
				33,3%	66,6%		
X _{1.8}				18	12	132	4,40
				60%	40%		
X _{1.9}				13	17	137	4,43
				43,3	56,6%		
X _{1.10}				20	10		4,67
				66,6%	33,3%		
Rata- rata Keseluruhan							4,600

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 30 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada etika audit (X1) berada pada daerah tinggi dengan rata-rata keseluruhan sebesar 46,00. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang sangat baik terhadap etika. Pada variabel etika, terlihat bahwa nilai mean tertinggi sebesar 4,77 berada pada item pernyataan kelima. Responden berpendapat bahwa Laporan hasil audit dapat dipertanggung jawabkan oleh auditor, untuk meningkatkan kualitas audit.

b. Analisis Deskriptif Variabel Profesionalisme (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel Profesionalisme terdiri dari 11 item pernyataan akan dilakukan analisis dari hasil jawaban responden mengenai kompleksitas tugas. Nilai rata-rata hasil jawaban responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Profesionalisme

tem Pernyataan	Frekuensi dan presentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
X _{2.1}				18	12	132	4,40
				60%	40%		
X _{2.2}		2		13	15	131	4,43
		6,6%		43,3%	50%		
X _{2.3}				13	17	137	4,70
				43,3%	56,6%		
X _{2.4}				19	11	131	4,50
				63,3%	36,6%		
X _{2.5}				16	14	136	4,37
				53,3%	46,6%		
X _{2.6}			2	16	12	130	4,47
			6,6%	55,5%	38,8%		
X _{2.7}				18	12	132	4,57
				60%	40%		

X _{2.8}				14	16	136	4,57
				46,6%	53,3%		
X _{2.9}		2		19	9	125	4,63
		6,6%		63,3%	30%		
X _{2.10}				9	21	129	4,43
				30%	70%		
X _{2.11}			1	12	17	136	4,50
			3,3%	40%	56,6%		
Rata- rata Keseluruhan							49,57

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 30 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Profesionalisme (X₂) berada pada daerah tinggi dengan rata-rata keseluruhan sebesar 49,57. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang sangat baik terhadap Profesionalisme. Pada variabel Profesionalisme, terlihat bahwa nilai mean tertinggi sebesar 4,70 berada pada item pernyataan ketiga. Responden berpendapat bahwa Auditor yakin bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan profesi auditor.

c. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Audit (Y)

Tabel 4.8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kualitas Audit

Item Pernyataan	Frekuensi dan presentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
Y1			1	16	13	132	4,40
			5,5%	55,5%	38,8%		
Y2				17	13	133	4,37
				56,6%	43,3%		
Y3				15	15	135	4,57
				50%	50%		
Y4				15	15	135	4,43
				50%	50%		

Y5				19	11	131	4,53
				63,3%	36,6%		
Y6				16	14	134	4,40
				53,3%	46,6%		
Y7				13	17	137	4,47
				43,3%	56,6%		
Y8				13	17	137	4,17
				43,3%	56,6%		
Y9				11	19	139	4,66
				36,6%	63,3%		
Y10				17	13	133	4,38
				56,6%	43,3%		
Y11				9	21	141	4,66
				30%	70%		
Rata- rata Keseluruhan							49,57

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 30 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada kualitas audit (Y) berada pada daerah sangat tinggi dengan rata-rata keseluruhan sebesar 49,57. Ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang sangat baik terhadap kualitas audit. Pada variabel kualitas audit, terlihat bahwa nilai mean tertinggi sebesar 4,66 berada pada item pernyataan kesembilan. Responden berpendapat bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.

4.2.3. Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

4.2.3.1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation*. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ r tabel maka dapat dikatakan valid . pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 30 responden dan besarnya df dapat dihitung $30-2 = 28$ dengan $df = 28$ dan $\alpha = 0,5$ didapat r tabel = 3,061 .

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Etika Audit (X1)	X1.1	0,917	0,3	Valid
	X1.2	0,850	0,3	Valid
	X1.3	0,917	0,3	Valid
	X1.4	0,515	0,3	Valid
	X1.5	0,596	0,3	Valid
	X1.6	0,917	0,3	Valid
	X1.7	0,753	0,3	Valid
	X1.8	0,534	0,3	Valid
	X1.9	0,509	0,3	Valid
	X1.10	0,912	0,3	Valid
Profesionalisme Audit (X2)	X2.1	0,633	0,3	Valid
	X2.2	0,472	0,3	Valid
	X2.3	0,615	0,3	Valid
	X2.4	0,555	0,3	Valid
	X2.5	0,701	0,3	Valid
	X2.6	0,352	0,3	Valid
	X2.7	0,633	0,3	Valid
	X2.8	0,501	0,3	Valid
	X2.9	0,470	0,3	Valid
	X2.10	0,578	0,3	Valid
	X2.11	0,605	0,3	Valid

Kualitas Audit (Y)	Y1	0,604	0,3	Valid
	Y2	0,905	0,3	Valid
	Y3	0,816	0,3	Valid
	Y4	0,832	0,3	Valid
	Y5	0,949	0,3	Valid
	Y6	0,811	0,3	Valid
	Y7	0,805	0,3	Valid
	Y8	0,805	0,3	Valid
	Y9	0,743	0,3	Valid
	Y10	0,809	0,3	Valid
	Y11	0,399	0,3	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan r hitung lebih besar daripada r -tabel. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

4.2.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Etika	908	Reliabel
2	Profesionalisme	752	Reliabel
3	Kualitas Audit	932	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel etika, profesionalisme dan kualitas audit yaitu dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.4. Hasil Analisis Data

4.2.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen apakah masing-masing variabel independen hubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Dalam hal ini untuk mengetahui masing-masing pengaruh Etika dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya. Output dari program *SPSS Statistics Version 25* diperoleh nilai regresi seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,5,659	7,341		-,771	,447
Etika Auditor	,707	,116	,659	6,085	,000
Profesionalisme Auditor	,467	,124	,407	3,754	,001

Dependent Variable: Kualitas Audit

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$KP = -5,659 + 0,707 X_1 + 0,467 X_2$$

Persamaan Regresi diatas dapat dijelaskan seperti ini :

- a. Nilai Koefisien Regresi untuk Variabel Etika menunjukan nilai positif sebesar 0,707. Dapat diartikan bahwa jika etika ditingkatkan satu maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,707.
- b. Nilai Koefisien Regresi untuk variabel Profesionalisme menunjukan nilai positif sebesar 0,467. Dapat diartikan bahwa jika profesionalisme ditingkatkan satu maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,467.

4.2.4.2. Uji Hopotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R_2)

Pengujian dengan menggunakan Uji Koefisien Determinasi (R_2) yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variabel etika X_1 , Profesionalisme X_2 terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit secara simultan pada Inspektorat Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini untuk mencari koefisien determinasi menggunakan nilai *Ajusted R Square* seperti tabel d bawah ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,832 ^a	,693	,670	2,23604	2,082

a. Predictors: (Constant), Profesionalisme Auditor, Etika Auditor

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hubungan antara Etika (X1) dan Profesionalisme (X2) terhadap kualitas audit (Y) termasuk dalam kategori hubungan yang cukup berarti dengan nilai $R = 0,832$. Kemudian untuk melihat seberapa besar kontribusi Etika X1 dan Profesionalisme X2 mempengaruhi Kualitas Audit (Y), dapat dilihat dengan menggunakan rumus koefisien penentu yaitu $KP = R \text{ Square} \times 100\% = 0,693 \times 100\% = 69,3 \%$ artinya Etika dan Profesionalisme memberikan kontribusi terhadap Kualitas Audit sebesar 69,3 % atau dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh Etika dan Profesionalisme sebesar 69,3 % sedangkan sisanya sebesar 30,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independen secara bersama- sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	304,503	2	152,252	30,451	,000 ^b
Residual	134,997	27	5,000		
Total	439,500	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

b. Predictors: (Constant), Profesionalisme Auditor, Etika Auditor

Hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh F Hitung adalah sebesar 30,451 lebih besar dari $F_{\text{tabel}} = 3,35$ dengan hasil signifikansi sebesar 0,000. Jadi jika d bandingkan maka $F_{\text{hitung}} >$ dari F_{tabel} yaitu $30,451 > 3,35$ sehingga disimpulkan bahwa Etika dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel Independen secara Individual terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Prsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5,659	7,341		-,771	,447
Etika Auditor	,707	,116	,659	6,085	,000
Profesionalisme Auditor	,467	,124	,407	3,754	,001

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung untuk variabel Etika sebesar 6,085 dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tabel t, diperoleh angka t tabel sebesar 3,061 sehingga T_{hitung} lebih besar daripada T_{tabel} ($6,085 > 3,061$) maka etika mempengaruhi Kualitas Audit secara parsial. Angka signifikansi Etika

(X1) menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 dan H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel bebas yaitu etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.

2.) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung untuk variabel Profesionalisme sebesar 3,754 dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tabel t , diperoleh angka t tabel sebesar 3,061 sehingga T_{hitung} lebih besar daripada T_{tabel} ($3,754 > 3,061$) maka Profesionalisme mempengaruhi Kualitas Audit secara parsial. Angka signifikansi Profesionalisme (X2) menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka H_0 dan H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel bebas yaitu Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.

4.2.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Etika mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya dengan Koefisien Regresi sebesar 0,707 dengan signifikansi 0,000 hasil tersebut membuktikan bahwa Etika auditor sangat berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya hal ini sesuai dengan pendapat Jones (1991) dalam Sukrisno Agoes dan Jan Hoesda (2012) menyimpulkan secara empiris bahwa intensitas moral berbeda-beda sesuai moral itu sendiri, dan masalah moral terkait pada berbagai jenis perilaku pengurangan kualitas audit.

Kemudian hasil penelitian yang didapatkan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya dengan Koefisien Regresi sebesar 0,467 dengan signifikansi 0,001 hasil tersebut membuktikan bahwa Profesionalisme auditor sangat berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya hal ini sesuai dengan pendapat (Rosnidah dkk, 2011) Sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan auditor yang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi .

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Etika dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti antara Etika dan Profesionalisme merupakan variabel yang saling mendukung satu sama lain atau dengan kata lain Etika Auditor dan Profesionalisme Auditor akan menentukan kualitas audit itu baik atau tidak dengan demikian, semakin baik Etika yang dimiliki auditor dan Semakin baik Profesionalisme yang dimiliki Auditor maka akan menghasilkan audit yang berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya, dengan koefisien regresi sebesar 0,707 dan signifikansi 0,000 ($\text{sig} < 0,05$). Hal ini berarti semakin tinggi Etika yang dimiliki Auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.
2. Profesionalisme Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya, dengan koefisien regresi sebesar 0,467 dan signifikansi 0,001 ($\text{sig} < 0,05$). Hal ini berarti semakin tinggi Profesionalisme yang dimiliki Auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.
3. Etika dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya. dengan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $30,451 > 3,35$. Nilai *R Square* 0,704 membuktikan bahwa Etika dan Profesionalisme memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit sebesar 69,3 sedangkan sisanya 30,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berarti semakin tinggi Etika yang

dimiliki auditor dan semakin baik Profesionalisme yang dimiliki auditor maka akan menghasilkan audit yang berkualitas.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini peneliti memberikan saran untuk meningkatkan kualitas audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya, diantaranya :

- a. Meningkatkan Etika Auditor dengan cara terus memberikan pemahaman mengenai pentingnya kode etik profesi dan memberikan sanksi kepada auditor yang terbukti melanggar kode etik agar menimbulkan efek jera.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Auditor dengan cara mengikut sertakan auditor pada berbagai pelatihan, workshop, sosialisasi dan bimbingan teknis serta membuat standar audit yang terukur untuk menguji Profesionalisme para Auditor.

Selain itu bagi para peneliti selanjutnya kiranya dapat menggunakan variabel lain untuk mengukur kinerja auditor yang juga berpengaruh selain Etika dan Profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2014). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* jilid 1. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arens, Alvin A, Randall j. Elder, Mark S, Beasley, 2010. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta : Erlangga.
- De Angelo, L.E. 1981. Auditor Independence, “*Low Balling*”, and *Disclosure Regulation*. *Journal of Accounting and Economics* 3. Agustus. P . 113-127
- Eder., Beasley., Arens., and Jusuf (2011). *Jasa Audit dan Assurance*. Buku 1, Penerbit : Salemba empat, Jakarta.
- Futri, Putu Septiani dan Gede Juliarsa. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali. 2014
- Ida Rosnidah. 2010. *Kualitas Audit : Refleksi Penelitian Empiris*. Jurnal Akuntansi volume XIV/3/September/2010. Jakarta : Candi Mas metropole.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN
- Mulyadi. 2008. **Sistem Akuntansi**. Cetakan Keempat Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Mutivariete dengan Program IBM SPSS 21*, Universitas Diponogoro. Semarang. 2013.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kapupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang *Standar Pemeriksaa Keuangan Negara*. Jakarta.

_____, Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

_____, Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat.

Rai Gusti Agung 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus*. Penerbit : Salemba Empat.

Sawyer's Lawrence. 2008. *Sawyer's Internal Auditing*. Terjemahan Oleh ali Akbar : Edisi 5. Buku 3 Jakarta : Salemba Empat

Standar Akuntansi Akuntan publik (SPAP), 2011.

A. KUESIONER PENELITIAN

Tasikmalaya, 09 April 2019

Kepada Yth :

Responden

Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Dede Nuraisah

NIM : 4122.4.16.12.0014

Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi,
UNWIM

Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Winaya Mukti, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul ***“Pengaruh Etika dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Di Inspektorat Kota Tasikmalaya”***.

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengingat kualitas penelitian ini sangat bergantung pada Bapak/Ibu, maka saya berharap Bapak/Ibu dapat menjawab dengan sejujurnya tentang apa yang dirasakan, dilakukan dan dialami, bukan berdasarkan kondisi ideal, tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik penelitian, semua data yang masuk akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis saja.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini, kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai harganya bagi saya. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat Saya,

Dede Nuraisah

IDENTITAS RESPONDEN

:

.....

1. Nama .

2. Umur : ☐ < 25 ☐ 26-35
☐ 36-55 ☐ > 55

3. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Pendidikan

4. Terakhir : ☐ S3; ☐ S2; ☐ S1; ☐ D3;

5. Jabatan : ☐ Auditor Madya
☐ Auditor Muda
☐ Auditor Pertama
☐ Lain-lain, sebutkan.....

6. Lama Bekerja : ☐ < 1 th
☐ antara 1-5 th
☐ antara 6-10 th
☐ > 10 th

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapakan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah sebagai berikut :

SS = jika isi pernyataan tersebut **SANGAT SETUJU** dilakukan

S = jika isi pernyataan tersebut **SETUJU** dilakukan

RR = jika isi pernyataan tersebut **RAGU-RAGU** dilakukan

TS = jika isi pernyataan tersebut **TIDAK SETUJU** dilakukan

STS = jika isi pernyataan tersebut **SANGAT TIDAK SETUJU** dilakukan

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL ETIKA AUDITOR

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Auditor melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab					
2.	Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi intern					
3.	Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap auditan/obrik					
4.	Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi masyarakat					
5.	Laporan Hasil audit dapat dipertanggung jawabkan oleh auditor, untuk meningkatkan kualitas audit.					
6.	Laporan audit sesuai dengan aturan SAK yang telah ditentukan					
7.	Sebagai audior memiliki rasa tanggung jawab bila hasil pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan					
8.	Jika suatu laporan hasil audit ada kesalahan, saya mampu mempertanggung jawabkan atas laporan					

	hasil audit tersebut untuk meningkatkan kualitas audit.					
9.	Dalam aktivitasnya auditor internal selalu bersikap objektif.					
10.	Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun yang mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya					

**DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PROFESIONALISME
AUDITOR**

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Auditor menggunakan segenap kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan proses pengauditan					
2.	Auditor dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan, tidak berada dibawah tekanan orang lain					
3.	Auditor yakin bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan profesi auditor					

4.	Profesi auditor merupakan profesi yang penting di masyarakat					
5.	Auditor menggunakan keahlian dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal untuk melaksanakan tugas audit					
6.	Dalam menentukan ketepatan tingkat materialitas, auditor menggunakan dasar pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan audit					
7.	Saya puas apabila hasil audit yang saya lakukan berguna bagi yang membutuhkan informasi tersebut					
8.	Menjunjung tinggi kode etik dalam profesi merupakan keharusan					
9.	Dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan, saya tidak berada dibawah tekanan apapun					
10.	Penting bagi saya untuk menjalin relasi dengan rekan sesama profesi					
11.	Saya perlu mengikuti organisasi formal maupun nonformal untuk memperoleh informasi terbaru					

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS AUDIT

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya dapat menemukan sekecil apapun kesalahan/penyimpangan yang ada di laporan keuangan yang saya audit					
2.	Saya tidak pernah melakukan rekayasa. Temuan apapun saya laporkan apa adanya					
3.	Saya selalu bersikap hati-hati dan profesional dalam melakukan tugas Audit					
4.	Hasil audit saya berisi informasi yang relevan					
5.	Laporan hasil audit saya dapat dipahami oleh auditan					
6.	Saat menerima penugasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan.					
7.	Rekomendasi yang saya berikan dapat memperbaiki kesalahan/penyimpangan yang ada					
8.	Laporan hasil pemeriksaan memuat					

	temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara obyektif, serta rekomendasi yang konstruktif					
9.	Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.					
10.	Untuk mendapatkan kualitas hasil pekerjaan yang baik seorang auditor harus konsisten berfikir dengan cermat.					
11.	Laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal.					

Terimakasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner.

B. Rekapitulasi Jawaban Responden

No Respond	No. Butir Angket Kinerja Karyawan (X1) Etika Auditor										Total Skor
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49

[illegible]

No Respon d	No. Butir Angket Kinerja Karyawan (X2) Profesionalisme Auditor											Total Skor
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P1 1	
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	5	50
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
6	5	2	5	4	5	5	5	4	2	5	5	47
7	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	47
8	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	50
9	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	49
10	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	49
11	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	49
12	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	53
13	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	47
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
15	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	50
16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
17	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	50
18	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	46
19	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	5	50
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
24	5	2	5	4	5	5	5	4	2	5	5	47

25	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	47
26	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	50
27	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	49
28	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	49
29	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	49
30	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	53

No Respon d	No. Butir Angket Kinerja Karyawan (Y) Kualitas Audit											Total Skor
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	
1	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	48
2	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	49
3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	47
4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
6	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
7	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	48
8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	46
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
13	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	47
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
18	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	49

19	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	46
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
24	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	47
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
29	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	49
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55

C. Statistik Deskriptif

1. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Etika Auditor	30	41	50	46,00	3,629
Profesionalisme Auditor	30	44	55	48,50	3,391
Kualitas Audit	30	44	55	49,57	4,281
Valid N (listwise)	30				

2. Statistik Deskriptif Pernyataan

a. Etika Audit

X_{1,1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	21	105	116,67
Setuju	4	9	36	50,00
Jumlah		30	141	100

X_{2,1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	21	105	116,67
Setuju	4	7	28	38,89
Netral	3	2	6	11,11
Jumlah		30	139	100,00

X_{3,1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	9	45	50,00
Setuju	4	21	84	116,67
Jumlah		30	129	100,00

X_{4,1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	20	100	111,11
Setuju	4	10	40	55,56
Jumlah		30	140	100,00

X_{5.1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	23	115	127,78
Setuju	4	7	28	38,89
Jumlah		30	143	100,00

X_{6.1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	21	105	116,67
Setuju	4	9	36	50,00
Jumlah		30	141	100,00

X_{7.1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	10	50	55,56
Setuju	4	20	80	111,11
Jumlah		30	130	100,00

X_{8.1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	12	60	66,67
Setuju	4	18	72	100,00
Jumlah		30	132	100,00

X_{9.1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	17	85	94,44
Setuju	4	13	52	72,22
Jumlah		30	137	100,00

X_{10.1}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	20	100	111,11
Setuju	4	10	40	55,56
Jumlah		30	140	100,00

b. Profesionalisme Audit**X_{1.2}**

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	12	60	66,67
Setuju	4	18	72	100,00
Jumlah		30	132	100,00

X_{2.2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	15	75	83,33
Setuju	4	13	52	72,22
Tidak setuju	2	2	4	11,11
Jumlah		30	131	100,00

X_{3,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	17	85	94,44
Setuju	4	13	52	72,22
Jumlah		30	137	100,00

X_{4,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	11	55	61,11
Setuju	4	19	76	105,56
Jumlah		30	131	100,00

X_{5,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	16	80	88,89
Setuju	4	14	56	77,78
Jumlah		30	136	100,00

X_{6,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	12	60	66,67
Setuju	4	16	64	88,89
Netral	3	2	6	11,11
Jumlah		30	130	100,00

X_{7,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	12	60	66,67
Setuju	4	18	72	100,00
Jumlah		30	132	100,00

X_{8,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	16	80	88,89
Setuju	4	14	56	77,78
Jumlah		30	136	100,00

X_{9,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	9	45	50,00
Setuju	4	19	76	105,56
Tidak setuju	2	2	4	11,11
Jumlah		30	125	100,00

X_{10,2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	9	45	50,00
Setuju	4	21	84	116,67
Jumlah		30	129	100,00

X_{11.2}

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	17	85	94,44
Setuju	4	12	48	66,67
Netral	3	1	3	5,56
Jumlah		30	136	100,00

c. Kualitas Audit

Y1

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	13	65	72,22
Setuju	4	16	64	88,89
Netral	3	1	3	5,56
Jumlah		30	132	100,00

Y2

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	13	65	72,22
Setuju	4	17	68	94,44
Jumlah		30	133	100,00

Y3

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	15	75	83,33
Setuju	4	15	60	83,33
Jumlah		30	135	100,00

Y4

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	15	75	83,33
Setuju	4	15	60	83,33
Jumlah		30	135	100,00

Y5

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	11	55	61,11
Setuju	4	19	76	105,56
Jumlah		30	131	100,00

Y6

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	14	70	77,78
Setuju	4	16	64	88,89
Jumlah		30	134	100,00

Y7

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	17	85	94,44
Setuju	4	13	52	72,22
Jumlah		30	137	100,00

Y8

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	17	85	94,44
Setuju	4	13	52	72,22
Jumlah		30	137	100,00

Y9

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	19	95	105,56
Setuju	4	11	44	61,11
Jumlah		30	139	100,00

Y10

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	13	65	72,22
Setuju	4	17	68	94,44
Jumlah		30	133	100,00

Y11

Keterangan	Bobot	Jumlah Responden	Skor	Persentase
Sangat Setuju	5	21	105	116,67
Setuju	4	9	36	50,00
Jumlah		30	141	100,00

D. Uji Kualitas Data

1. Etika Auditor (X₁)

Correlations

		X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X _{1.7}	X _{1.8}	X _{1.9}	X _{1.10}	Etika Auditor
X _{1.1}	Pearson Correlation	1	,926**	1,000**	,463**	,499**	1,000**	,463**	0,238	0,279	,926**	,917**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,010	0,005	0,000	0,010	0,206	0,136	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{1.2}	Pearson Correlation	,926**	1	,926**	,507**	,578**	,926**	,429*	0,045	0,085	,858**	,850**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,004	0,001	0,000	0,018	0,813	0,654	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{1.3}	Pearson Correlation	1,000**	,926**	1	,463**	,499**	1,000**	,463**	0,238	0,279	,926**	,917**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,010	0,005	0,000	0,010	0,206	0,136	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{1.4}	Pearson Correlation	,463**	,507**	,463**	1	0,279	,463**	0,200	0,000	-0,095	,550**	,515**
	Sig. (2-tailed)	0,010	0,004	0,010		0,136	0,010	0,289	1,000	0,617	0,002	0,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{1.5}	Pearson Correlation	,499**	,578**	,499**	0,279	1	,499**	,390*	0,129	0,005	,613**	,596**
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,001	0,005	0,136		0,005	0,033	0,498	0,978	0,000	0,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{1.6}	Pearson Correlation	1,000**	,926**	1,000**	,463**	,499**	1	,463**	0,238	0,279	,926**	,917**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,010	0,005		0,010	0,206	0,136	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{1.7}	Pearson Correlation	,463**	,429*	,463**	0,200	,390*	,463**	1	,866**	,809**	,500**	,753**
	Sig. (2-	0,010	0,018	0,010	0,289	0,033	0,010		0,000	0,000	0,005	0,000

	tailed)											
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X ₁₈	Pearson Correlation	0,238	0,045	0,238	0,000	0,129	0,238	,866**	1	,934**	0,289	,534**
	Sig. (2-tailed)	0,206	0,813	0,206	1,000	0,498	0,206	0,000		0,000	0,122	0,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X ₁₉	Pearson Correlation	0,279	0,085	0,279	-0,095	0,005	0,279	,809**	,934**	1	0,190	,509**
	Sig. (2-tailed)	0,136	0,654	0,136	0,617	0,978	0,136	0,000	0,000		0,314	0,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X ₁₀	Pearson Correlation	,926**	,858**	,926**	,550**	,613**	,926**	,500**	0,289	0,190	1	,912**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,005	0,122	0,314		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Etika Auditor	Pearson Correlation	,917**	,850**	,917**	,515**	,596**	,917**	,753**	,534**	,509**	,912**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,004	0,001	0,000	0,000	0,002	0,004	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	10

2. Profesionalisme Auditor (X₂)

Correlations

		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X _{2.10}	X _{2.11}	Profesionalisme Auditor
X _{2.1}	Pearson Correlation	1	-0,034	0,165	-0,027	0,355	0,114	1,000*	-0,082	0,185	,802**	,678**	,633**
	Sig. (2-tailed)		0,857	0,384	0,885	0,055	0,548	0,000	0,667	0,327	0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2.2}	Pearson Correlation	-0,034	1	0,065	,527**	0,179	-0,258	-0,034	,493*	,695*	-0,210	-0,139	,472**
	Sig. (2-tailed)	0,857		0,733	0,003	0,343	0,169	0,857	0,006	0,000	0,264	0,463	0,009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2.3}	Pearson Correlation	0,165	0,065	1	0,357	,665*	,602*	0,165	0,279	-0,076	0,279	,471**	,615**
	Sig. (2-tailed)	0,384	0,733		0,052	0,000	0,000	0,384	0,136	0,688	0,136	0,009	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2.4}	Pearson Correlation	-0,027	,527**	0,357	1	,683*	-0,038	-0,027	,935*	0,076	-0,132	0,008	,555**
	Sig. (2-tailed)	0,885	0,003	0,052		0,000	0,844	0,885	0,000	0,688	0,486	0,967	0,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2.5}	Pearson Correlation	0,355	0,179	,665**	,683**	1	0,187	0,355	,607*	-0,152	0,321	,412*	,701**
	Sig. (2-tailed)	0,055	0,343	0,000	0,000		0,323	0,055	0,000	0,424	0,084	0,024	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2.6}	Pearson Correlation	0,114	-0,258	,602**	-0,038	0,187	1	0,114	-0,075	-0,051	,488**	0,265	0,352
	Sig. (2-tailed)	0,548	0,169	0,000	0,844	0,323		0,548	0,695	0,790	0,006	0,156	0,056
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2.7}	Pearson Correlation	1,000**	-0,034	0,165	-0,027	0,355	0,114	1	-0,082	0,185	,802**	,678**	,633**

	Sig. (2-tailed)	0,000	0,857	0,384	0,885	0,055	0,548		0,667	0,327	0,000	0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2,8}	Pearson Correlation	-0,082	,493**	0,279	,935**	,607*	-0,075	-0,082	1	0,152	-0,175	-0,056	,501**
	Sig. (2-tailed)	0,667	0,006	0,136	0,000	0,000	0,695	0,667		0,424	0,355	0,771	0,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2,9}	Pearson Correlation	0,185	,695**	-0,076	0,076	-0,152	-0,051	0,185	0,152	1	0,149	0,108	,470**
	Sig. (2-tailed)	0,327	0,000	0,688	0,688	0,424	0,790	0,327	0,424		0,433	0,571	0,009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2,10}	Pearson Correlation	,802**	-0,210	0,279	-0,132	0,321	,488*	,802**	-0,175	0,149	1	,544**	,578**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,264	0,136	0,486	0,084	0,006	0,000	0,355	0,433		0,002	0,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X _{2,11}	Pearson Correlation	,678**	-0,139	,471**	0,008	,412*	0,265	,678**	-0,056	0,108	,544**	1	,605**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,463	0,009	0,967	0,024	0,156	0,000	0,771	0,571	0,002		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Professional Auditor	Pearson Correlation	,633**	,472**	,615**	,555**	,701*	0,352	,633**	,501*	,470*	,578**	,605**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,009	0,000	0,001	0,000	0,056	0,000	0,005	0,009	0,001	0,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	11

3. Kualitas Audit (Y)

Correlations

[illegible]

Y8	Pearson Correlation	0,267	,765**	,605**	,740**	,665**	,413*	1,000**	1	,870**	,493**	0,015	,805**
	Sig. (2-tailed)	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000		0,000	0,006	0,939	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y9	Pearson Correlation	0,175	,665**	,761**	,623**	,579**	,573**	,870**	,870**	1	,386*	-,0196	,743**
	Sig. (2-tailed)	0,355	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000		0,035	0,299	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y10	Pearson Correlation	,462*	,729**	,605**	,605**	,870**	,665**	,493**	,493**	,386*	1	,572**	,809**
	Sig. (2-tailed)	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,006	0,035		0,001	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y11	Pearson Correlation	,473**	0,279	0,073	,364*	,498**	0,321	0,015	0,015	-,0196	,572**	1	,399*
	Sig. (2-tailed)	0,008	0,136	0,702	0,048	0,005	0,084	0,939	0,939	0,299	0,001		0,029
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kualitas Audit	Pearson Correlation	,604**	,905**	,816**	,832**	,949**	,811**	,805**	,805**	,743**	,809**	,399*	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,932	11

E. Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832 ^a	,693	,670	2,23604

a. Predictors: (Constant), PROFESIONALISME AUDITOR, ETIKA AUDITOR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304,503	2	152,252	30,451	,000 ^b
	Residual	134,997	27	5,000		
	Total	439,500	29			

a. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT

b. Predictors: (Constant), PROFESIONALISME AUDITOR, ETIKA AUDITOR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,659	7,341		-0,771	0,447
	ETIKA AUDITOR	0,707	0,116	0,659	6,085	0
	PROFESIONALISME AUDITOR	0,467	0,124	0,407	3,754	0,001

a. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT